

**IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG
MENGARAH PADA TERORISME (RAN PE) DI BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME**

Disusun Oleh:

NAMA : ALFRIDA HEANITY PANJAITAN
NPM : 2141021042
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister
Terapan Administrasi Publik (M. Tr. Ap)



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2023

**IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG
MENGARAH PADA TERORISME (RAN PE) DI BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME**

Disusun Oleh:

NAMA : ALFRIDA HEANITY PANJAITAN
NPM : 2141021042
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2023

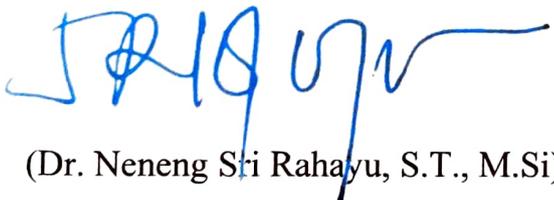
**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama	Alfrida Heanity Panjaitan
NPM	2141021042
Jurusan	Administrasi Publik
Program Studi	Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi	Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis (Bahasa Indonesia)	Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Judul Tesis (Bahasa Inggris)	<i>The Implementation of The National Action Plan of Preventing and Countering Violent Extremism That Leads to Terrorism in the National Counter Terrorism Agency of the Republic of Indonesia</i>

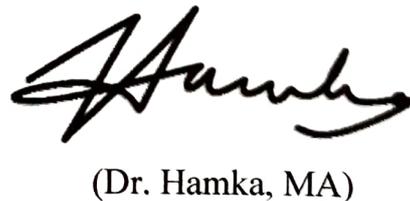
Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si)

Pembimbing II



(Dr. Hamka, MA)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA	ALFRIDA HEANITY PANJAITAN
NPM	2141021042
JURUSAN	ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI	MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
JUDUL TESIS	IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME DI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada;

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Desember 2023
Pukul : 09.00 - 10.30

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA

Sekretaris Dr. Mala Sondang Silitonga, MA

Anggota Dr. Firman Hadi Rivai, MPA

Pembimbing 1 Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si

Pembimbing 2 Dr. Hamka, MA



**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Alfrida Heanity Panjaitan
NPM	2141021042
Jurusan	Administrasi Publik
Program Studi	Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi	Manajemen Kebijakan Publik

Dengan ini menyatakan bahwa, tesis yang telah saya susun dengan Judul “IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME DI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulis tesis ini merupakan plagiat atau penjiplak terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 09 Desember 2023

mbuat pernyataan,



(Alfrida Heanity Panjaitan)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan YME, karena atas berkat dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme”. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M. Tr. Ap) pada Program Magister Terapan, Politeknik STIA LAN.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak memberikan andil dalam proses penulisan tesis ini:

1. Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si dan Bapak Dr. Hamka, MA, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan berbagai arahan, koreksi, saran serta masukan yang konstruktif dalam penulisan tesis ini;
2. Bapak Prof. Dr. R Luki Karunia, MA selaku dosen penguji yang telah memberikan berbagai masukan guna menyempurnakan penelitian tesis ini;
3. Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, MA selaku dosen penguji yang juga memberikan berbagai masukan dalam penelitian ini;
4. Seluruh dosen pengajar pada Magister Manajemen Kebijakan Publik Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah berkenan memberikan ilmunya kepada saya selama menempuh perkuliahan;
5. Seluruh staf Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan Politeknik STIA LAN Jakarta khususnya Mbak Mega dan Mbak Seha yang telah membantu proses administrasi selama masa perkuliahan sampai dengan pelaksanaan sidang akhir;
6. Para Narasumber yang luar biasa Direktur Perlindungan BNPT, Bapak Brigjen Pol Imam Margono, Kepala Sub Direktorat Aparat Penegakan Hukum BNPT, Bapak Suroyo , Kepala Sub Direktorat Kerjasama Regional, Bapak Kolonel Yanurendra H. A. P ST., MMgt.STUD; Bapak Azhar, Ibu Indah Amaritasari, Bapak Munajat, Ph.D.; Direktur Eksekutif Wahid Foundation, Bapak Mujtaba Hamdi, Kasubdit Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, Kemendagri, Bapak Anug

Kurniawan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, Bapak Bambang Sukardi, dan UNDP PROTECT Project, Bapak Abdul Charis yang telah memberikan berbagai informasi yang komprehensif;

7. Rekan-rekan seperjuangan di Magister Administrasi Publik terutama pada konsentrasi Manajemen Kebijakan Publik Kelas A STIA LAN Jakarta yang selalu kompak dan memberikan dukungan, motivasi, dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Kedua orang tua, Bapak Porlan Panjaitan dan Ibu Anda Pandiangan, Suami, Samuel, Darren, dan adik-adik saya atas dorongan dan semangat dalam penyusunan tesis ini;
9. Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT, Bapak Dionnisius Swasono yang memberikan motivasi, dukungannya untuk menyelesaikan penelitian ini;
10. Direktur dan teman-teman di Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT dan Sekretariat Bersama RAN PE yang senantiasa memberikan semangat, motivasi dan berbagai masukan konkrit kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini;
11. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan demi terselesaikannya tesis saya, semoga segala kebaikan kalian dibalas berlipat-lipat oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata, peneliti memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu manajemen kebijakan publik dan dapat diterapkan di dalam praktik implementasi kebijakan, serta peneliti lain yang ingin memperdalam penelitian ini.

J A K A R T A

Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Esktrémisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

**Alfrida Heanity Panjaitan, Neneng, Hamka
Politeknik STIA LAN Jakarta**

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menentukan implementasi kebijakan RAN PE di BNPT serta strategi yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Struktur Birokrasi menjadi Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan RAN PE di BNPT. Sedangkan Komunikasi, Sumber Daya dan Disposisi menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut. Melalui penelitian ini juga ditemukan Strategi yang dapat dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat antara lain: Pertama, melakukan optimalisasi koordinasi di lingkungan BNPT dengan menyelenggarakan Forum Diskusi Rutin RAN PE di masing-masing Pilar RAN PE. Kedua, pembentukan manajemen teknologi untuk mengatasi persoalan atas kurangnya kapasitas penggiat RAN PE terhadap pelaporan RAN PE. Ketiga, dorongan untuk memasukkan Nomenklatur RAN PE dalam Sistem Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) BNPT dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029; Keempat, Penguatan Tim Sekretariat Sekber RAN PE dan; Kelima, mempersiapkan dokumen perpanjangan RAN PE Tahun 2025-2029. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif kepada BNPT selaku institusi yang memiliki tanggung jawab dalam mengoptimalkan pelaksanaan RAN PE hingga Tahun 2024 mendatang melalui penyelenggaraan rapat koordinasi yang berkelanjutan serta penguatan infrastruktur lainnya.

Kata Kunci: implementasi RAN PE di BNPT; faktor penghambat; faktor pendorong; strategi mengatasi faktor penghambat.

**The Implementation of the National Action Plan of Preventing and
Countering Violent Extremism That Leads to Terrorism in The National
Counter Terrorism Agency of Republic of Indonesia**

**Alfrida Heanity Panjaitan, Neneng, Hamka
Politeknik STIA LAN Jakarta**

Abstract

This research aims to identify the factors determine of the implementation of the NAP on PCVE policy in BNPT as well as the strategies carried out in overcoming the inhibiting factors of the policy implementation. This research uses a qualitative approach with data collection methods through interviews, observation, and document review. The results concluded that the Bureaucratic Structure is a supporting factor in the implementation of the NAP on PCVE policy at BNPT, while Communication, Resources and Disposition are the inhibiting factors for the implementation of the policy. Through this research also found Strategies that can be done in overcoming inhibiting factors include: First, optimizing coordination within the BNPT by holding Routine Discussion Forums on NAP on PCVE in each Pillar of NAP on PCVE. Second, the establishment of technology management to overcome the problem of the lack of capacity of activists on NAP on PCVE reporting. Third, encouragement to include the NAP on PCVE Nomenclature in the BNPT Work Plan and Budget System (RKAKL) and the 2025-2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN); Fourth, Strengthening the Secretariat Team of the NAP on PCVE Secretariat and Fifth, preparing an extension document for the NAP on PCVE 2025-2029. The results of this study are expected to be able to provide constructive input to BNPT as an institution that has the responsibility of optimizing the implementation of NAP PE until 2024 through continuous coordination meetings and strengthening other infrastructure.

Keywords: *the implementation of NAP on PCVE in BNPT; inhibiting factors; driving factors; strategies to overcome inhibiting factors.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Permasalahan	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	17
C. Kerangka Berpikir	59
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	63
A. Metode Penelitian	63
B. Tempat dan Waktu Penelitian	64
C. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	64
D. Teknis Pengolahan dan Analisis Data	67
E. Prosedur Validasi Model	69
F. Instrumen Penelitian.....	70
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	71
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	71
B. Penyajian Data dan Pembahasan	74
BAB V KESIMPULAN	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
DATA UMUM	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Peristiwa terkait tindakan ekstremisme kekerasan di Indonesia Tahun (2016-2020).....4



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Marilee S. Grindle	37
Gambar 2.2 Model Van Meter and Vand Horn	41
Gambar 2.3 Model Masmanian	43
Gambar 2.3 Kerangka berpikir Implementasi Pelaksanaan RAN PE di BNPT	63
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BNPT	73
Gambar 4.2 Peran Kepala BNPT dalam mendorong implementasi kebijakan RAN PE di Tingkat Pusat/Daerah maupun Kepada Masyarakat	92
Gambar 4.3 <i>Sequence</i> Pelaporan RAN PE	95
Gambar 4.4 Berbagai Regulasi yang mendorong Implementasi RAN PE di tingkat nasional maupun daerah	96
Gambar 4.5 Sosialisasi RAN PE Kepada Para Pemangku Kepentingan baik K/L di Tingkat Pusat/Daerah maupun Kepada Masyarakat	98
Gambar 4.6 Struktur Tim Sekretariat BNPT untuk Mendukung Pelaksanaan RAN PE Tahun 2020-2024	79
Gambar 4.7 Amanat Wapres dalam HUT 13 BNPT RI.....	83

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Utama kepada *Key Informan*
Lampiran 2 Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Program Magister
Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Serangan Terorisme di Indonesia 2016-2021.....	3
--	----------



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, masalah terorisme merupakan ancaman yang dapat mempengaruhi tatanan sosial dan politik bangsa serta menimbulkan ketakutan yang meluas di dalam negeri (BNPT, 2018). *Counter Terrorism and Violent Extremism Outlook, 2023* turut menyampaikan bahwa ancaman terhadap ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme di Indonesia pada 5 (lima) tahun ke belakang, antara tahun 2018 s.d. 2022 tetap menjadi ancaman keamanan nasional yang serius. Dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut, dapat menimbulkan kerusakan fisik dan non-fisik yang berupa hilangnya nyawa, menciptakan ketakutan masyarakat luas, penurunan kepercayaan publik, dampak ekonomi, serta mengganggu stabilitas politik (I-KHub BNPT, 2023). Sebagai contoh sebagaimana yang disebutkan Bardwell dan Iqbal (2020) dalam *The Economic Impact of Terrorism from 2000 to 2018* bahwa tragedi bom Bali 2002 menyebabkan kerugian ekonomi hingga 22 juta USD (Bardwell & Iqbal, 2021).

Dalam *Thirtieth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2610 (2021) concerning ISI (Da'esh), Al-Qaeda and associated individuals and entities (July 2022)* disampaikan bahwa dinamika terorisme di tingkat global masih terus berkeaja. Jaringan-jaringan terorisme global seperti ISIS dan Al-Qaeda maupun organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan jaringan tersebut juga masih terus aktif dan beraktivitas dalam melakukan aksi-aksi teror maupun berbagai pengembangan jaringan seperti perekrutan, propaganda, peningkatan kapasitas hingga pendanaan (United Nations Security Council, 2022). Selain itu ancaman terorisme perlu untuk mewaspada pejuang teroris asing (*Foreign Terrorist*

Fighters, atau FTF), yang melakukan perjalanan dari Asia Tenggara untuk bergabung dengan ISIS sekaligus gelombang kembalinya pejuang tersebut pasca terdesaknya ISIS di Irak dan Suriah oleh pasukan global (*global coalition*) (U.S. Embassy & Consulates in Indonesia, 2016).

Pada tingkat regional, negara-negara di Kawasan ASEAN masih menjadi negara yang relatif rentan terhadap ancaman terorisme secara global. Merujuk pada data yang diperoleh dari *Global Terrorism Index* (GTI) tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat ke-24 dengan kategori *medium impacted country*. Adapun pengukuran tersebut dilihat berdasarkan jumlah serangan teror dan jumlah korban jiwa. Beberapa negara di kawasan ini harus menghadapi

Menurut Peta Terorisme dan Strategi Penanggulangan Terorisme 2018 yang dirilis Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara, pola serangan teroris bergeser ke arah aksi kekerasan secara acak (*lone wolf*). *Lone wolf* adalah tipe teroris yang bertindak sendiri dan motivasinya seringkali sama suramnya dengan dorongan awal. Ekstremisme berbasis kekerasan yang masif merupakan indikasi meluasnya distribusi ancaman teroris dan lingkungan yang kondusif. Komunitas ini menggunakan kedua bentuk media tradisional, seperti pertemuan langsung, dan juga aktif dalam melakukan koordinasi dan kolaborasi online melalui internet.

Cara ini terbukti efektif untuk meluaskan propaganda dan agitasi mereka dalam menyebarkan ajaran maupun mempengaruhi publik untuk bersimpati dan mendukung aksi-aksi terorisme. Metode ini mereka lakukan mulai dari rekrutmen warga negara Indonesia untuk bergabung dalam suatu kelompok organisasi radikal yang mengarah pada tindak pidana terorisme, sampai teror publik pada hari H terjadinya aksi kekerasan. Termasuk dalam pola rekrutmen yang makin marak adalah pelibatan perempuan dan generasi muda dalam berbagai bentuk, dari mulai simpatisan, anggota, hingga pelaku bom bunuh diri (Wulandari, 2019).

Grafik 1.1 Serangan Terorisme Di Indonesia 2016-2021



Sumber: BNPT, diolah dari berbagai sumber, 2022.

Dapat kita lihat melalui grafik di atas bahwa serangan yang dilakukan oleh jaringan terorisme di Indonesia pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup berpengaruh. Kebijakan nasional yang ditujukan untuk mencegah dan melawan jenis ekstremisme kekerasan yang dapat mengarah pada terorisme diperlukan sebagian karena hal ini (Wahid Foundation, 2017).

Selain itu, seorang jurnalis dari MIT, J.M. Berger, mengatakan bahwa aksi ekstremisme kekerasan kini dapat disebarluaskan melalui media. Namun, kontak sosial langsung membuat ekstremisme kekerasan lebih mudah diakses. Ekstremisme kekerasan adalah untuk memobilisasi sekelompok besar orang di sekitar satu tujuan melalui tindakan kekerasan yang terkoordinasi (Berger, 2018). Tabel 1.1 menyajikan ringkasan data tentang frekuensi insiden ekstremis kekerasan yang terjadi di Indonesia.

Tabel 1.1. Jumlah Peristiwa terkait tindakan ekstremisme kekerasan di Indonesia Tahun (2016-2020)

Tahun	Insiden	Korban Jiwa	Cedera	Penangkapan Ekstremis kekerasan
2016	4	33	31	170
2017	1	3	27	176
2018	18	49	42	396
2019	9	6	17	297
2020	-	-	-	228
Total	32	91	117	1.267

Sumber: (Nugraha et al., 2022)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam ancaman ekstremisme kekerasan di Indonesia antara tahun 2017 dan 2018. Dapat kita lihat bahwa dengan kurun waktu setahun terdapat 19 insiden yang mengakibatkan 52 orang korban tewas di tempat dan 69 orang mengalami luka parah. Beberapa insiden yang terjadi juga menunjukkan bahwa fasilitas publik, aparat keamanan dan Infrastruktur kritis seringkali menjadi target sasaran para ekstremis (Tim Peneliti Habibie Center, 2018). Salah satu insiden ekstremisme berbasis kekerasan yang cukup berdampak yaitu pada tahun 2018 di Surabaya, terjadi insiden bom bunuh diri di gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Pantekosta dan Gereja Kristen Indonesia yang menewaskan 21 orang seketika (Tim Republika, 2018).

Data terorisme di Indonesia sebagaimana dilansir dalam data geospasial *Indonesia Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism (I-KHub)* hingga Juli 2023, telah terjadi 1.337 kejadian terorisme, dengan 676 pelaku, 132 aksi, dan 471 serangan plot. Kejadian tersebut berdampak pada 392 korban tewas, 788 korban luka-luka, dan terdapat 551 kerusakan bangunan.

Sedangkan dari segi kasus terorisme (kejadian/peristiwa dan pelaku), data geospasial I-KHub juga menyampaikan bahwa hampir semua provinsi di Indonesia sudah terpapar dan disusupi kelompok teroris (31 provinsi).

Selain itu, pandemi COVID-19 juga telah mengubah jenis serangan teroris dan ekstremis kekerasan, yaitu dengan tindakan *lone wolf*, pencurian data dunia maya, bom bunuh diri, dan kekerasan ekstrim yang mengarah pada tindakan terorisme. Contoh tersebut menunjukkan kompleksitas dan ambiguitas kesulitan Indonesia. (Agung Nugraha et al., 2022).

Alif Satria (2022) menyampaikan dalam 20 (dua puluh) tahun belakangan ini terdapat 4 fase upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Fase pertama sebelum tahun 2002, ditandai dengan hilangnya kesadaran dan kewaspadaan negara, aparat penegak hukum serta pertahanan dalam melihat ancaman terorisme di Indonesia. Fase yang kedua adalah pembentukan dan pembangunan kapasitas pelaksanaan penanggulangan terorisme. Selanjutnya pada fase ini telah ditetapkan Undang-undang tentang terorisme yang di dalamnya disampaikan bahwa terorisme merupakan kejahatan (*crime*) dan penanganannya.

Pada fase kedua itu juga, dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang diberikan mandat untuk menyusun kebijakan maupun strategi serta program-program dalam bidang penanggulangan terorisme. Melalui mandat tersebut BNPT aktif dalam melakukan berbagai upaya dalam aspek penanggulangan terorisme. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Satria (2022) yaitu pada fase ketiga dan keempat ini negara mulai fokus untuk membuat berbagai pengembangan kebijakan, program maupun berbagai perangkat dan regulasi dalam aspek pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Tahap keempat, kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2021 yang ditandai dengan konsolidasi kapasitas negara dalam penanggulangan ekstremisme dan terorisme, termasuk di antaranya adalah dengan hadirnya Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE yang inisiator dan *leading sector* kebijakan ini adalah BNPT.

RAN PE menjadi salah satu pendekatan lunak yang ditujukan untuk memerangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. RAN PE menjadi program yang terintegrasi dengan mencakup berbagai inisiatif yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga dalam rangka mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Dalam hal ini, RAN PE juga melengkapi berbagai peraturan dan kebijakan nasional mengenai tindak pidana ekstremisme kekerasan dan terorisme.

RAN PE merupakan bukti nyata kehadiran negara untuk mencegah kondisi rawan dan berpotensi mengancam hak atas rasa aman masyarakat dan terganggunya stabilitas keamanan nasional. Penetapan RAN PE ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya pencegahan tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang berkembang di Indonesia yang diwujudkan melalui pelaksanaan aksi-aksi nyata yang terpadu dan sinergis antar-pemangku kepentingan, baik antar-kelembagaan pemerintah tingkat pusat, maupun antar pemerintah pusat dan daerah, serta antara pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya, sebagai upaya menkonkritkan program pencegahan dan penanggulangan yang terpadu dan sinergis dimaksud, selanjutnya perlu untuk Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) dapat melaksanakan RAN PE yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Peran pemerintah daerah sangatlah strategis dalam pelaksanaan kebijakan ini, karena pemerintah daerah merupakan ujung tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Terdapat 3 (tiga) strategi dan inisiatif utama dalam menjalankan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE: (1) Pilar Pencegahan yang terdiri dari Kesiapsiagaan, Kontra-radikalisasi, dan Deradikalisasi (2) Pilar Penegakan Hukum, Pelindungan Saksi dan Korban, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional; dan (3) Pilar Kemitraan dan Kerja Sama Internasional.

Dalam pelaksanaan Perpres tersebut, tahun 2021 dibentuk sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan antara lain: Pembentukan Sekretariat Bersama RAN PE; Pembentukan Kelompok Kerja Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 48 K/L serta Pembentukan Tim Sekretariat Pendukung Pelaksanaan RAN PE yang terdiri dari personil di lingkungan BNPT, Kelompok Kerja Tematis RAN PE, yang terdiri dari Masyarakat Sipil dan juga Forum Kemitraan Nasional Pemerintah dan Pemangku Kepentingan di Masyarakat.

Peranan BNPT memiliki posisi strategis dalam kebijakan ini yaitu menjadi institusi penanggung jawab yang bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan kebijakan ini dapat dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga maupun pemangku kepentingan terkait lainnya. Selain itu, BNPT juga merupakan institusi yang bertugas untuk mengimplementasikan 116 (seratus enam belas) aksi sebagaimana yang dimandatkan dalam Perpres. Tentunya BNPT aktor utama yang mengupayakan kesuksesan kebijakan ini.

Merujuk pada Laporan Pelaksanaan RAN PE Tahun 2022 dan hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti yang menyampaikan adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan RAN PE dimaksud antara lain: Pertama, masih diperlukannya koordinasi yang efektif baik di internal BNPT maupun K/L yang terkait; Kedua, bahwa RAN PE belum dapat menjadi prioritas dan masuk dalam program masing-masing unit pelaksana; Ketiga, permasalahan terbanyak terkait dengan keterbatasan anggaran akibat adanya refocusing anggaran untuk penanganan dan pemulihan pasca COVID-19 sehingga cukup menyulitkan unit pelaksana di BNPT untuk mengalokasikan anggaran pelaksanaan kebijakan RAN PE ini.

Melihat berbagai kendala dan hambatan tersebut, maka BNPT sebagai inisiator sekaligus sebagai *leading sector* dalam kebijakan RAN PE ini memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi RAN PE hingga Tahun 2024 mendatang. Selanjutnya, penelitian ini juga akan

mengkaji berbagai faktor yang menghambat maupun mendorong implementasi kebijakan RAN PE di BNPT.

B. Identifikasi Masalah

Hasil identifikasi menunjukkan adanya kendala dalam implementasi kebijakan RAN PE di BNPT antara lain sebagai berikut:

1. Masih diperlukannya koordinasi yang efektif di internal BNPT;
2. RAN PE belum dapat menjadi prioritas dan masuk dalam program masing-masing unit pelaksana;
3. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami isu terkait ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
4. Keterbatasan anggaran, yang diakibatkan oleh kebijakan refocusing pemerintah dalam rangka penanganan dan pemulihan pasca COVID-19 sehingga cukup menyulitkan unit pelaksana di BNPT dalam mengalokasikan anggaran pelaksanaan kebijakan RAN PE ini.

C. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di BNPT?
2. Strategi apa yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di BNPT?

D. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan dalam pikiran ketika melakukan penelitian ini antara lain:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di BNPT.
2. Menemukan strategi dalam mengatasi faktor penghambat implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di BNPT.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Bagi praktisi, penelitian ini dapat memberikan ide/gagasan baru kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selaku inisiator dan *leading sector* kebijakan RAN PE maupun strategi yang efektif dan efisien untuk keberhasilan kebijakan tersebut.
2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai pembelajaran dalam memahami implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.